

Forum Freedom

Tema : Mekanisme Pemilihan Presiden

Narasumber : Indra J. Piliang

Hamid Basyaib (HB):

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Indra J. Piliang (IJP). Selamat pagi Bung Indra. Dia adalah peneliti senior di CSIS, dan banyak menulis tentang politik kontemporer Indonesia. Dia juga banyak muncul di televisi sehingga namanya tidak perlu lagi diperkenalkan. Tema kita kali ini adalah mekanisme pemilihan presiden.

Baru-baru ini Indra ikut dalam rakernas PDIP di Bali. Presiden Megawati di situ meminta bahwa pilpres didahulukan dibanding pemilihan legislatif. Alasannya adalah untuk memperkuat sistem presidensiil. Dan dalam sistem presiden siil peran eksekutif harus lebih kuat dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Usul ini kemudian ditanggapi oleh banyak pihak, termasuk Partai Golkar. Partai Golkar menganggap bahwa dengan demikian PDIP melihat tidak ada korelasi antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Banyak lagi tanggapan, termasuk dari PKB yang mengatakan bahwa itu bukan soal prinsip, itu hanya soal teknis.

Dan Indra sendiri menulis artikel khusus di Kompas, tanggal 23 Januari yang lalu. Indra melihat bahwa usulan Mega itu termasuk terobosan untuk memperkuat sistem presidensiil.

Nah, saya ingin bertanya lebih jauh tentang argumen anda bung Indra. Atau anda bisa menjabarkan lagi argumen anda di Kompas beberapa hari yang lalu. Kenapa anda mendukung hal itu?

IJP:

Selamat pagi para pendengar. Ketika pemilu 2004 diselenggarakan, pemilu presiden langsung, kita tahu bahwa pemilu presiden ini terlambat dibanding pemilu legislatif. Kenapa ini terjadi. Saya kira kelemahan kinerja SBY sekarang ini bukan hanya karena karakter personalnya yang lebih intelektual dalam melihat persoalan, tapi juga karena sistem politik yang ada.

Kita lihat pemilu putaran pertama dimenangkan SBY dan kedua Megawati. Ketika pemilu putaran kedua digelar, sejumlah partai itu nebeng. Dan kita tahu kontrak

pertama calon presiden dan wakil presiden itu adalah dengan partai politik. Bukan dengan konstituen.

Ini yang saya katakan di artikel saya itu bahwa calon presiden dan wapres itu disandera oleh partai politik, sebelum dia disandera oleh rakyat. Akibatnya di sini sistem presidensiil menjadi lemah. Artinya presiden akan sangat tergantung pada pertimbangan politik di parlemen termasuk dalam kabinetnya sendiri. Yang kita lihat sekarang kan otonomi di tingkat menteri-menteri.

HB:

Karena menteri-menteri itu adalah kepanjangan kepentingan parpolnya.

IJP:

Ya.

HB:

Nah, di situ juga persoalannya, bung. Usul anda itu, yang mirip dengan usulan Megawati itu, tidak ada hambatan konstitusional. Konstitusi memungkinkan hal ini. Cuma dalam realitas politiknya hal ini akan mengalami hambatan karena seperti yang anda katakan bahwa parpol itu masih dominan.

Bagaimana anda menanggapi realitas ini.

IJP:

Ya. Ini kan yang sering saya sebut partai-krasi. Di mana legislatif dan eksekutif itu digerakkan oleh kepentingan partai politik. Dan ini tergantung mereka mau konsentrasi di eksekutif atau di legislatif.

Artinya masyarakat tidak bisa menebak kepentingan partai politik itu ada di level mana. Ini harus dipisahkan dengan pemilihan presiden dan wapres yang dilakukan lebih dulu.

Memang realitasnya partai-partai banyak yang menolak hal itu, tapi kita tahu bahwa PDIP adalah juga partai politik. Kepentingan partai Golkar di sini adalah untuk menguasai semua level.

Beberapa waktu lalu juga keras berhembus kabar dari rapimnas partai Golkar bahwa partai Golkar ingin memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif. Artinya ini adalah bahwa yang dipilih pertama adalah DPR dan DPRD, dan kemudian

berikutnya yang dipilih bersamaan adalah presiden dan kepala-kepala daerah. Artinya presiden dipilih satu paket dengan bupati, gubernur dan walikota secara bersamaan. Kenapa ini dipikirkan karena kalau dalam pemilu legislatif ada satu partai atau koalisi partai yang menang, maka seandainya dalam pemilu eksekutif dia menang dia bisa kontrol semuanya.

Ini bagi saya justru memicu persoalan yang berbahaya. Bagaimana dengan checks and balances. Ok ada dua lembaga yang kita pilih, yakni legislatif dan eksekutif. Tapi dua lembaga ini digerakkan oleh partai politik yang sama. Bagaimana kita mengontrol partai politik ini sementara mereka ada di luar kantor-kantor eksekutid dan legislatif.

Untuk mengubah keabu-abuan seperti ini, makanya pemilu presiden dilangsungkan lebih dahulu, dan ini akan membawa kewibawaan yang lebih tinggi bagi presiden dan presiden lebih bisa menegosiasikan program-programnya dengan parpol meskipun partai dia kalah dalam pemilu legislatif.

Kita bisa melihat dari pengalaman Amerika Serikat yang tahun lalu menggelar pemilu dan dimenangkan oleh partai Demokrat, tapi itu tidak mengubah sistem presidensiil. Yang terjadi adalah George Bush hanya menyesuaikan beberapa program dia dengan Partai Demokrat. Ini salah satunya. Sama juga dengan pemilihan lokal di Iran di mana Ahmadinejad partainya dikalahkan dalam pemilu di Iran. Ini tidak mengurangi kredibilitas Ahmadinejad sebagai presiden Iran.

Hal lain yang perlu kita lihat adalah bahwa DPR kan tidak bisa menjatuhkan presiden. Begitu juga sebaliknya. Ini salah satu kuncinya. Bila pemilu presiden didahulukan eksekusi misi dan visi dia akan jauh lebih mudah ketimbang proses pemilihannya dikebelakangkan.

HB:

Itu kemudian yang banyak orang menyebutnya sebagai fenomena dagang sapi. Nah, kalau boleh saya simpulkan, ada 3 kemungkinan yang muncul kalau pemilu presiden didahulukan. Pertama, akan muncul presiden yang tidak punya dukungan partai di parlemen. Kedua, sangat mungkin akan muncul presiden yang terlalu kuat karena dia dipilih langsung oleh rakyat dan tidak perlu bernegosiasi dengan partai-partai. Ketiga, mungkin ada dualisme kepemimpinan antara dua lembaga tinggi negara, yakni presiden dan DPR.

Nah, tampaknya keinginan anda itu akan memunculkan kemungkinan ketiga ini. Bagaimana anda melihat hal ini.

IJP:

Hampir selalu ada ruang untuk negosiasi ya. Dan hampir semua politisi kita itu berkiblat ke istana. Artinya mereka lebih cenderung bergantung pada kepentingan presiden dibanding dengan kepentingan legislasi. Nah, ruang kompromi itu kan dibuka oleh konstitusi dan oleh Undang-undang.

Misalnya penyusunan APBN. APBN ini kan bukan hak prerogatif presiden. Ini adalah sebuah program yang dinegosiasikan dengan panitia anggaran. Dan kemudian disahkan lewat sidang paripurna. Begitu juga dengan proses legislasi. Ini kan lewat proses negosiasi antara legislatif dan eksekutif.

Nah, ruang kompromi ini akan menghambat dualisme itu. Artinya apa, dengan cara ini masing-masing lembaga akan profesional, dan partai politik juga akan profesional. Jadi dalam mengambil keputusan tidak bisa seperti sekarang lagi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ketua DPR Agung Laksono mengatakan dalam forum Golkar bahwa masalah flu burung harus diatasi seperti ini. Ini tidak bisa. Dia dalam kapasitas apa. Apakah ucapannya itu sudah dirapatkan dulu di DPR.

HB:

Baik. Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar. Dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

HB:

Selamat pagi kembali, saudara-saudara. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Bung Indra J. Piliang.

Tadi dia sudah menjelaskan bagaimana fenomena pemilu presiden yang didahulukan itu lebih baik, dengan berbagai alasan. Misalnya presiden dengan demikian tidak menjadi sandera partai politik. Jika presiden dipilih langsung, maka dia bisa lebih bernegosiasi dalam proses pengambilan keputusan. Karena dia mendapat mandat langsung dari rakyat dan tidak didahului oleh parpol.

Bung Indra, anda juga mengatakan bahwa pilkada sekarang ini tidak lagi bergantung pada parpol dan komposisi kursi di pusat dan daerah. Bagaimana anda menjelaskan hal ini.

IJP:

Yang saya maksud adalah pilkada. Pilkada yang digelar 2008 nanti, itu menggunakan hasil pemilu legislatif pada tahun 2004. Ada jarak 4 tahun di sini. Padahal kalau anda melihat hasil survei LSI, tingkat popularitas partai-partai di masing-masing daerah itu kan fluktuatif. Makanya banyak sekarang partai politik yang dominan di satu daerah tapi calonnya tidak terpilih. Di Sumbar misalnya.

HB:

Itu sumbernya adalah yang anda sebut itu tadi ya. Hasil pemilu sebelumnya. Artinya dalam 4 tahun itu bisa terjadi perubahan yang besar sekali.

IJP:

Ya. Dan di sini tidak ada pemilu legislatif sela untuk menentukan apakah masyarakat masih mendambakan partai yang sama pada waktu pilkada digelar.

Ini yang saya katakan bahwa masyarakat itu tidak menggantungkan sepenuhnya aspirasi mereka pada partai politik. Mereka juga bisa meletakkan aspirasi mereka pada figur tertentu. Nah, mengapa figur ini harus disandera oleh parpol. Dari mana logikanya.

Nah, dari sini bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sumber kekuatan politik seorang kepala daerah itu berada di partai. Itu kan mandat yang diberikan oleh rakyat dan mandat itu bisa diberikan kepada dua lembaga yang kita pilih secara langsung ini.

Saya pikir di sini letak persoalannya.

HB:

Nah, saya ingin memperjelas hal ini dengan perbandingan. Kasusnya adalah PPP yang sedang bermuktamar sekarang. Kita tahu bahwa dalam pemilu 2004 dia dapat 6-7% suara. 8% ya. Dan menurut poling LSI bulan lalu, partai ini hanya mendapat 3%. Macam-macam penjelasannya.

Bisa anda bayangkan, kurang dari separoh. Padahal pemilu digelar dengan asumsi bahwa PPP mendapat 8% suara. Itu yang menjadi soal ya.

IJP:

Ya, itu yang menjadi soal. Kenapa harus disandera. Padahal kekuasaan eksekutif daerah itu besar sekali.

HB:

Sekarang bagaimana mengatasinya. Anda kan menyebut pemilu legislatif sela. Apa ini maksudnya.

IJP:

Ini sebenarnya gagasan teman saya. Pak Anies Baswedan. Saya pikir itu sangat masuk akal. Harus ada satu tahap evaluasi terhadap kinerja lembaga parlemen itu sendiri. Perlu ada pembatasan masa kerja mereka sendiri. Kalau presiden 5 tahun, mereka cukup 2,5 tahun.

HB:

Seperti di Amerika ya.

IJP:

Ya. Ini adalah teknik untuk menjinakkan para politisi. Karena kalau mereka terlalu lama duduk dalam kekuasaannya mereka akan cenderung merasa powerful. Ini menurut saya pemikiran yang baik. Dan kita akan pikirkan dalam perubahan UU partai politik.

Karena pada dasarnya saya lihat pilkada ini adalah pemilu sela. Dalam pilkada 2008 nanti itu bisa dikatakan siapa yang menang bisa dilihat sebagai pendahuluan pemilu 2009. Ini karena hal ini melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, jawa saja jumlah pemilihnya itu 65% dari seluruh pemilih di Indonesia.

Tidak ada masalah konstitusional di sini. Dalam konstitusi itu hanya disebut bahwa pasangan cawapres dan capres itu didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

HB:

Atau periode, atau durasi, bahwa mereka bertugas selama lima tahun sebagaimana presiden. Di konstitusi tentang parlemen juga ada seperti itu?

IJP:

Ini kan hanya konvensi, konvensi ketatanegaraan.

HB:

Kalau tentang parlemen ada tidak. Maksud saya, kalau ada, usul anda dan Anies itu tidak bisa jalan.

IJP:

Kan konstitusi juga bisa diamandemen. Seingat saya itu hanya konvensi tentang ketatanegaraan. 5 tahun itu kan sebetulnya konvensi ketatanegaraan. Dan konvensi ini menjadikan orang berpikir bahwa sistem tatanegara kita ya berjalan 5 tahunan.

HB:

Kalau anda setuju dengan potong setengah masa jabatannya ya. Di Amerika tadi kita sebut presiden 4 tahun, kongres itu 2 tahun. Kalau untuk kita, presiden 5 tahun, parlemen katakanlah 2,5 tahun.

Nah di sini ada masalah lain Bung Indra. Bagaimana anda memecahkan masalah biaya. Kan ada yang mengatakan biayanya akan mahal sekali.

IJP:

Menurut saya informasi itu agak menyesatkan Bung Hamid. Soal biaya yang mahal itu. saya tanya ke teman saya Kevin di UNDP. Dia ikut pemilu Afganistan di sana. Dia bilang bahwa pemilu di Indonesia ini paling murah dibanding di negara-negara lain, termasuk di Afrika. Satu orang satu dolar.

HB:

Murah sekali itu. Mengapa begitu.

IJP:

Dia hitung semuanya. Dibagi jumlah penduduk, jumlah anggaran, dan hasilnya murah, dibandingkan dengan Afganistan yang bisa 10 dolar per orang.

HB:

Sepuluh kali lipat kita ya.

IJP:

Kita merasa berat karena kita sedang mengalami krisis ekonomi. Orang mengatakan bahwa biaya pemilu sekian triliun, besar sekali. Itu menyedihkan. Dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduknya, ini murah sekali.

Demokrasi kan memang mahal.

HB:

Dan menurut saya tidak perlulah dijadikan alasan.

IJP:

Ini menurut saya hanya ketakutan beberapa orang saja untuk dievaluasi oleh publik kita.

HB:

Ok. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Apa dampak langsung kepada rakyat bila pilpres itu didahulukan.

IJP:

Pendidikan politik itu akan jauh lebih fleksibel dan sederhana. Selama Orba orang tidak bisa membedakan mana yang pemilu DPR mana yang DPRD. Karena mereka memilih gambar. Dan jarak fluktuasinya kecil sekali. Mereka hanya memilih parpol dan parpol yang punya hak untuk menentukan parlemen lokal dan nasional.

Nah, yang saya lihat dari pengalaman pemilu 2004 itu adalah bahwa kampanye yang paling banyak dilakukan adalah siapa yang menjadi calon presiden dan wapres.

HB:

Itu aneh ya.

IJP:

Artinya apa. Kampanye program calon presiden dan wakil presiden itu dalam pemilu legislatif yang seharusnya mereka bicara tentang undang-undang, tentang bujet, pengawasan dan kinerja mereka di parlemen.

Nah ini menyesatkan. Bagi masyarakat akan jauh lebih sederhana jika pemilu presiden itu menentukan dan mencari presiden dan wapres, sementara pemilu legislatif menentukan anggota legislatif, yakni orang-orang yang kritis yang nantinya akan menentukan undang-undang dan mengontrol eksekutif.

HB:

Jadi lebih jelas ya.

IJP:

Ya lebih jelas. Kalau kemarin kan semrawut. Untuk masalah parlemen mereka datang ke eksekutif, untuk masalah eksekutif mereka datang ke parlemen. Sekarang kan untuk masalah banjir mereka demo ke DPRD. Saya kira itu salah satunya.

HB:

Ok. Jadi kesimpulannya adalah bahwa usulan anda itu, yang juga dikemukakan oleh Ibu Megawati di Bali, lebih banyak manfaatnya. Di level stabilitas politik lebih terjaga. Dan di level rakyat ini jauh lebih baik karena perlunya pendidikan politik.

Baik Bung Indra, waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.